KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: ANTARA EFISIENSI DAN PEMERATAAN

Oleh : Baban Sobandi, SE

Kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa pakar, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa economies of scale akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, perkembangan akhir-akhir ini, menunjukkan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua lebih menekankan aspek distribusi (pemerataan) selain aspek efisiensi. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik dan pemerintahan, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik dan pemerintahan, tetapi juga kajian ekonomi.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional dan Daerah pada hakikatnya dilakukan berdasarkan pada pemikiran bahwa daerah secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang secara integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem nasional. Pembangunan Nasional yang dilakukan pada dasarnya adalah juga pembangunan Daerah. Atas dasar pemikiran itu, muncul pendekatan pembangunan atas dasar sektor kegiatan tanpa memperhatikan lokasinya. Namun, dalam perkembangannya pendekatan tersebut dirasakan kurang lengkap, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kondisi dan

potensi yang sama, sehingga muncul permasalahan kesenjangan (*inequity*) dan inefisiensi dalam pembangunan.

Masih dalam tataran konsepsi pembangunan nasional, muncul pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap daerah dalam suatu negara tertentu, yaitu pendekatan pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan daerah, pada babak selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik di kalangan praktisi maupun di kalangan akademisi. Yang semula banyak didasarkan atas pertimbangan ekonomi belaka, kemudian diintegrasikan dengan perkembangan masyarakat yang makin menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan dari pemerintah serta tuntutan

kemandirian dan partisipasi pembangunan. Kini, masalah kebijakan pembangunan daerah, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut.

Mekanisme Pasar dan Campur Tangan Pemerintah

Kebijakan pembangunan, yang diimplementasikan oleh tingkat pemerintahan manapun, secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya *income percapita*. Dan peningkatan *income percapita* ini bisa dicapai apabila terjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

Ada dua alternatif kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menurut Richardson. *Pertama*, jika efisiensi nasional merupakan tujuan utama yang harus dicapai, maka kebijakan mendorong migrasi tenaga kerja inter regional lebih baik dari pada mendorong relokasi industri. Tetapi jika pemuasan preferensi-preferensi lokasional merupakan prioritas yang lebih tinggi, maka usaha untuk mendorong perpindahan modal harus lebih ditekankan. *Kedua*, metode "tenaga kerja keluar pekerjaan masuk" (*labour out jobs in*) dapat dilakukan jika yang merupakan permasalahan regional adalah ketidak-seimbangan pasar tenaga kerja lokal dan untuk menghilangkan perbedaan pengangguran di daerah.

Sementara itu, Clark & Petters berpendapat bahwa operasi kekuatan pasar memberikan pemecahan yang

lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Menurut pendapat ini, pengaturan buatan manusia tidak luwes dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan spasial dalam hal biaya, harga, dan pendapatan, yang sering kali timbul setiap saat sebagai akibat dari interdependensi umum dalam perekonomian ruang. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan disebar diantara sejumlah individu perusahaan, dan bukannya disentralisasikan, maka kesalahan-kesalahan peramalan akan cenderung saling meniadakan.

Richardson mengkritik pandangan ini. Menurutnya, teori keseimbangan umum yang melandasinya cenderung bersifat statik, sedangkan proses yang terjadi di daerah bersifat dinamik. Menurut Richardson, argumentasi yang mengasumsikan persaingan sempurna dan *marginalisme*, tidak satu pun diantaranya yang relevan dengan perekonomian ruang. Oligopoli dan monopoli adalah bentuk-bentuk pasar spasial yang lebih lazim. Sedangkan perubahan-perubahan lokasional biasanya adalah merupakan suatu lompatan besar atau sama sekali tidak ada perpindahan, dan bukannya suatu perpindahan marginal. Keputusan-keputusan lokasi mungkin juga dilandaskan pada irrasionalitas dan diambil dengan mengabaikan pengetahuan yang relevan.

Penolakan terhadap mekanisme pasar dapat juga disebabkan karena divergensi biaya dan manfaat sosial (*social cost and benefit*), seperti biaya-biaya kongesti sosial di pusat-pusat aglomerasi. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar menimbulkan pemborosan sumber daya, misalnya mekanisme pasar tidak mampu mewujudkan keuntungan potensial dari investasi dalam migrasi atau mempekerjakan pekerja yang kehilangan

pekerjaan di daerah mereka sendiri dan yang tidak mampu pindah ke daerah lain. Akhirnya, secara politik, konsep *laissez faire* mungkin tidak dapat diterima, jika melanggengkan kepincangan antar daerah dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja.

Pemilihan Pelaksana Pembangunan

Terlepas dari perdebatan antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah, kenyataan menunjukkan bahwa kini pemerintah di setiap negara sangat menentukan jalannya pembangunan, dalam derajat yang berbeda-beda. Yang menjadi perhelatan lebih lanjut adalah level pemerintahan mana yang harus melaksanakan pembangunan tersebut. Coralie Bryant dan Louise G. White (1989) berpendapat bahwa adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya kelemahan pemerintahan pusat dalam melakukan kontrol sentral. Menurutnya, dalam prakteknya ada dua bentuk desentralisasi, yaitu yang bersifat administratif (*dekonsentrasi*) dan yang bersifat politik (*devolusi*).

Desentralisasi administratif berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat daerah. Para pejabat di daerah bekerja dalam batas rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen kebijakan dan kekuasaan (diskresi) serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat hakikat jasa dan pelayanan pada tingkat daerah. Diskresi mereka dapat bervariasi mulai dari peraturan *pro-forma* sampai keputusan yang lebih substansial. Desentralisasi politik berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan

kontrol tertentu terhadap sumber daya diberikan pada pejabat daerah. Sebagai contoh adalah Pemerintahan Federalis di Amerika yang memberikan kekuasaan perpajakan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam pembebanan tanggung jawab pada berbagai tingkatan pemerintahan, Bryant dan White menyarankan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, suatu proyek atau program hendaknya diserahkan pada organisasi apapun yang memiliki "insentif" untuk melaksanakannya. *Kedua*, "lingkungan politis" suatu organisasi harus menunjang pelaksanaan proyek. *Ketiga*, bahwasannya kebanyakan proyek melibatkan beberapa organisasi, sehingga hubungan antar organisasi dan cara-cara organisasi berinteraksi menjadi penting. *Keempat*, harus dibuat pilihan dengan mempertimbangkan bukan hanya kapasitas yang telah dimiliki organisasi, melainkan juga sehubungan dengan pengembangan kemampuan kelembagaan organisasi itu.

Cara lain untuk mempertimbangkan kapan suatu aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat nasional dan kapan dilakukan oleh pemerintahan daerah tergantung kepada tiga hal yaitu: *Pertama*, banyaknya informasi yang diperlukan. Sejauh bahwa kebijakan itu didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik serta pada kepastian tentang prosedur serta hasil akhir, maka dapat dijalankan pengarah dan kontrol sentral yang lebih besar. Tetapi kalau suatu kebijakan dioperasikan dalam konteks yang tidak menyediakan informasi yang cukup lengkap, preferensi dan kebutuhan konsumennya kurang jelas, dan tugas administratornya kabur, maka sebaiknya dilaksanakan di tingkat daerah.

Kedua, cara pemasokan komoditas yang diperlukan oleh masyarakat konsumen. Ada barang-barang yang harus diproduksi pada skala besar dan memerlukan modal yang besar (*capital intensive*), namun ada pula barang atau jasa yang pemasokannya melibatkan kontak antar individu, misalnya pelayanan kesehatan. Untuk komoditas jenis pertama lebih baik dilakukan atau dipasok pada tingkat nasional. Sementara itu, untuk jenis yang kedua lebih baik dipasok pada tingkat daerah, karena lebih sulit dipantau, bervariasi sesuai dengan lokasinya, dan sangat bergantung kepada pandangan masyarakat. Semakin banyak kontak tatap muka yang dituntut, akan makin sukarlah mengelola suatu organisasi besar karena kesulitan mengawasi mutu hubungan antar pribadi dan sukarnya mengukur hasil.

Ketiga, peraturan dan daya tanggap. Peraturan dan pengaturan berarti memberlakukan standar-standar yang adil. Dan keadilan sering tercapai dengan baik bila pengaturan ditangani di tingkat nasional. Namun, bila daya tanggap menjadi perhatian utama, mungkin bermanfaat jika dilakukan desentralisasi tugas, sehingga petugas daerah dapat menyesuaikan programnya dengan kondisi-kondisi daerahnya.

Pembangunan Daerah dan Implikasi Pembiayaannya

Seperti dikemukakan sebelumnya, pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya diawali dengan penetapan target nasional. Setelah target ditetapkan kemudian dipilih, di daerah mana saja

kegiatan itu dilakukan. Biasanya yang dipilih adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya (*factor endowment*) yang cocok untuk mencapai target tersebut. Dengan pendekatan ini, dapat terjadi daerah-daerah yang memiliki sumber daya sangat minim tetap tertinggal.

Pendekatan regional di lain pihak, mempunyai strategi yang agak berbeda. Pendekatan ini umumnya didahului dengan meninjau sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang akan dikembangkan. Setelah sumber daya yang ada di daerah tersebut diketahui, kemudian dilakukan penelitian sektor mana saja yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Kedua pendekatan pembangunan ini berorientasi kepada pertumbuhan (*growth*), dan pendekatan pemerataan (*equalization*).

Selain itu, kebijakan pembangunan daerah timbul karena wilayah suatu negara relatif luas, sehingga perlu penyerahan urusan kepada tingkat organisasi pemerintahan yang langsung dapat melayani masyarakat. Pembagian kegiatan pembangunan (tugas dan wewenang) antara pelbagai tingkat pemerintah tersebut, pada akhirnya memunculkan masalah - perlunya kebijakan hubungan keuangan (*intergovernmental fiscal relationships*) antara Pusat dan Daerah.

Menurut Kristiadi (1997), hubungan keuangan bukan semata-mata menyangkut masalah bagaimana mencukupi dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan di Pusat dan di Daerah, tetapi juga merupakan masalah bagaimana memenuhi kebutuhan semua masyarakat yang tersebar di daerah-daerah, yang kondisi geografinya sangat berbeda-beda. Menciptakan suatu *sistem* hubungan

keuangan, bukanlah hal yang mudah. Masalahnya begitu rumit dan saling terkait. Banyak faktor harus dipertimbangkan untuk merumuskan sistem hubungan keuangan yang baik. Disamping faktor obyektif-teknis-ekonomis, juga harus dipertimbangkan faktor non ekonomis seperti faktor politis dan lain-lain.

Dampak Negatif Desentralisasi Penuh

Prud' Homme (1995), melihat sisi negatif dari adanya kebijakan desentralisasi penuh. Menurutnya, desentralisasi yang murni akan menyebabkan paling tidak tiga dampak negatif, yaitu disparitas yang semakin tinggi, inefisiensi dalam produksi dan alokasi, serta instabilitas. Makin tingginya disparitas antar daerah didasarkan kepada anggapan bahwa potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pemilikan sumber daya. Sementara itu, desentralisasi murni berarti memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas dalam mengolah sumber daya, menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan belanja), serta dalam menentukan arah pembangunan ekonominya demi kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Walhasil, karena potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda, maka disparitas akan semakin tinggi. Daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang akan laju lebih cepat ketimbang daerah miskin.

Inefisiensi produksi sebagai akibat desentralisasi murni menurut Prud'

Homme disebabkan karena daerah akan memaksakan diri dalam melakukan produksi suatu komoditas tertentu meskipun secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan. Selain itu, terdapat kemungkinan suatu komoditas hanya akan efisien jika diproduksi dalam skala besar (*economies of scale*), tetapi karena daerah memaksakan diri untuk memproduksinya, maka yang terjadi adalah banyaknya perusahaan dalam komoditas tersebut dengan skala yang relatif kecil. Masih dalam koteks pemaksaan diri dalam memproduksi suatu komoditas, maka secara nasional dapat dinilai juga sebagai inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk komoditas lain, karena motivasi kemandirian, dialokasikan kepada komoditas tertentu yang kurang efisien.

Argumentasi instabilitas berpangkal dari luasnya kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. Dengan keluasan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut, maka efektivitas kebijakan fiskal yang digulirkan oleh pemerintahan Pusat akan kurang. Dengan demikian apabila terjadi suatu guncangan dalam perekonomian, sulit bagi pemerintahan pusat untuk meredamnya, dan efek dari kebijakan fiskal bagi setiap daerah akan berbeda-beda.

Ketenagakerjaan dan Migrasi Antar Daerah

Tindakan untuk mendorong migrasi tenaga kerja antar daerah tergantung pada tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Richardson, dalam beberapa hal tidak perlu diragukan bahwa bantuan kepada para migran adalah tepat. Tindakan-tindakan tersebut dapat berwujud:

Pertama, subsidi untuk pendidikan dan latihan kembali secara tidak langsung mendorong mobilitas. Subsidi seperti itu sering kali konsisten dengan efisiensi, karena adanya kemungkinan-kemungkinan: kurangnya investasi yang dilakukan oleh orang-orang secara individual dalam diri mereka sendiri disebabkan ketidak-tahuan; ketidak-seimbangan pasar modal; dan divergensi antara hasil-hasil sosial dan swasta.

Kedua, pemberian bantuan keuangan langsung kepada kaum migran. Cara ini mungkin harus ditempuh, kendatipun perbedaan pendapatan antar daerah besar, disebabkan karena beratnya biaya-biaya migrasi. Tingkat hasil yang diperoleh dari migrasi dapat dihitung untuk kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari investasi-investasi lain.

Terhadap kebijakan untuk mendorong perpindahan tenaga kerja antar daerah ini, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang. Pihak-pihak yang mendukung berargumen bahwa kebijakan seperti itu akan menimbulkan keseimbangan yang lebih baik antara penawaran tenaga kerja daerah dan kesempatan kerja. Output total akan bertambah karena tingkat lapangan kerja akan mengalami kenaikan dan dalam banyak hal para pekerja akan berpindah dari industri yang produktivitasnya rendah ke industri yang produktivitasnya tinggi. Selanjutnya, perbedaan pendapatan antar daerah akan semakin berkurang. Menurut kelompok ini, kebijakan seperti itu tidak saja konsisten dengan efisiensi nasional tetapi juga menghilangkan ciri-ciri stagnasi dari daerah yang terbelakang.

Sementara itu, pihak-pihak yang menentang berargumentasi bahwa migrasi menimbulkan akibat-akibat

negatif terhadap daerah tujuan dan daerah asal. Berkenaan dengan daerah tujuan, salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah bahwa biaya sosial marginal (*marginal social cost*) dari migrasi masuk lebih besar dari pada sumbangannya kepada pajak daerah. Contoh yang sering diajukan adalah semakin naiknya biaya marginal bagi penyediaan pelayanan kepada masyarakat apabila kaum migran hanya membayar biaya rata-rata.

Argumen ini dibantah oleh pihak pendukung. Menurut mereka, kendati pun biaya sosial marginal dari migrasi lebih besar dari pada biaya swasta marginal (*marginal private cost*), namun kelebihan ini mungkin juga diimbangi oleh manfaat-manfaat sosial marginal (*marginal social benefit*) yang lebih besar, sehingga tidak berarti bahwa migrasi itu tidak efisien.

Selanjutnya, semakin naiknya biaya marginal dari pelayanan pemerintah adalah mencerminkan bahwa jasa-jasa tertentu mempunyai fungsi penawaran yang kurang elastis, dan penyedia jasa-jasa ini akan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga yang bergandengan dengan migrasi.

Argumen kelompok penentang lainnya adalah bahwa migrasi ke daerah-daerah makmur cenderung memperbesar tendensi inflasi. Pendapat ini bertumpu pada asumsi bahwa migrasi masuk menambah permintaan investasi yang lebih besar dari pada penambahan tabungan yang diakibatkannya, dan menambah permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari pada penambahan penawaran tenaga kerja yang diakibatkannya.

Tetapi pengaruh terhadap permintaan dan penawaran tidaklah timbul secara simultan. Pengaruhnya yang langsung

adalah menambah penawaran tenaga kerja. Tentu ada kemungkinan bahwa pada akhirnya pengaruh ini “diimbangi lebih” oleh pengaruh kaum migran terhadap investasi dalam perumahan dan penyediaan pelayanan-pelayanan sosial dan terhadap permintaan turunan (*derived demand*) akan tenaga kerja. Namun demikian, sebelum hal ini terwujud, posisi penawaran sudah berkesempatan untuk melakukan penyesuaian kembali. Dalam jangka pendek, kaum migran akan lebih berfungsi sebagai pemakai jasa-jasa yang sudah ada dan dengan demikian berarti lebih intensifnya pemakaian jasa-jasa tersebut. Selanjutnya, pengaruh tersebut tergantung kepada tipe inflasinya. Migrasi masuk cenderung memperbesar inflasi, jika tipenya adalah inflasi permintaan (*demand-pull inflation*), tetapi cenderung untuk mengurangi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya tenaga kerja (*cost-push inflation*).

Kelompok penentang, juga berargumen bahwa migrasi mengakibatkan pengaruh negatif seperti kurangnya penggunaan modal sosial dan bertambah besarnya beban per kapita, kelebihan kapasitas dalam industri swasta, efek multiplier menurun terhadap industri jasa lokal, menurunnya kualitas angkatan kerja, hilangnya investasi dalam orang-orang migran berpendidikan, dan perpindahan modal. Namun argumentasi ini pun dibantah oleh kelompok pendukung. Menurutnya, dalam kenyataan konsekuensi ini biasanya tidak begitu berarti.

Argumen lain yang tidak menyetujui pemindahan tenaga kerja dan mendukung pemindahan pekerjaan, adalah bahwa biaya pengembangan perkotaan (umpamanya prasarana-prasarana dasar, perumahan dan pelayanan-pelayanan)

untuk penduduk yang semakin bertambah banyak, mungkin lebih tinggi di daerah-daerah yang secara potensial menarik kaum migran dari pada di daerah asal. Akan tetapi argumen yang paling kuat lebih bersifat sosial.

Kebijakan Relokasi Industri

Studi yang dilakukan oleh Hafiz A. Pasha dan Kaiser Bengali di Baluchistan mengenai dampak insentif fiskal (*fiscal incentives*) terhadap industrialisasi di daerah terbelakang menghasilkan kesimpulan bahwa, insentif fiskal berpengaruh terhadap tingkat investasi dan lokasi investasi, pembangunan daerah, serta terhadap kesejahteraan dan efisiensi.

Pertama, insentif fiskal lebih berpengaruh terhadap terjadinya perpindahan investasi dari daerah yang sudah maju ke daerah yang terbelakang, ketimbang meningkatkan total investasi secara umum. Perpindahan investasi ini disebabkan *internal rate of return (IRR)* dari suatu investasi makin meningkat di Daerah terbelakang melebihi di daerah maju, sebagai akibat diberikannya pembebasan bea masuk dan *tax holiday*.

Kedua, Secara umum daerah terbelakang tidak banyak mendapatkan manfaat jangka panjang dari relokasi industri tersebut, karena: (1) industri yang mengalami perpindahan adalah industri padat modal, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal; (2) industri yang berkembang tersebut menggunakan sebagian besar bahan baku berasal dari impor dan daerah sekitarnya; (3) Pasar output yang dihasilkan sebagian besar berada di luar daerah terbelakang tersebut; (4) Lokasi perkantoran dari industri tersebut tetap berada di daerah sekitarnya.

Ketiga, dilihat dari sisi kesejahteraan dan efisiensi, ternyata kurang baik. Terjadinya relokasi industri berarti menurunkan efisiensi dalam alokasi dan inefisiensi produksi. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum mengalami penurunan. Dalam hal ini adanya insentif fiskal telah menciptakan suatu *trade-off* antara efisiensi nasional dan keadilan antar daerah.

Sementara itu Richardson, berpendapat apabila jenis industri tersebut adalah *footloose industry*, maka campur tangan pemerintah dalam penentuan lokasi adalah wajar, namun demikian tidak berarti campur tangan ini menjamin terciptanya efisiensi nasional.

Argumen lain yang mendukung campur tangan pemerintah dalam mendorong relokasi industri ke daerah-daerah terbelakang adalah bahwa hal ini akan memperbaiki keimbangan daerah (*regional balance*). Meskipun konsep ini terlalu subyektif dan kabur sehingga sukar untuk dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi suatu aspek yang layak mendapat perhatian ialah kemungkinan adanya komplementaritas dalam perkembangan antar daerah, sehingga suatu sistem regional yang terdiri dari daerah-daerah yang besarnya dan tingkat pendapatannya relatif serupa dapat tumbuh lebih cepat dari pada sistem regional dimana satu atau dua daerah ketinggalan jauh di belakang.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat dilihat bahwa perdebatan terhadap kebijakan pembangunan daerah terus berlanjut. Pro dan kontra terhadap kebijakan ini dapat ditemukan dengan argumentasi masing-masing. Secara

umum, argumentasi ekonomi yang mereka kemukakan pada dasarnya bermuara kepada alasan-alasan, efisiensi dan kesejahteraan, serta keadilan dan pemerataan. Sedangkan argumentasi politik sering dikaitkan dengan alasan-alasan kemandirian, partisipasi politik, dan pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat

Kepustakaan:

- Bryant, Coralie, & Louise G. White, *Desentralisasi dan Koordinasi*, dalam "Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Kristiadi, JB, *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Sistem Anggaran Lokal*, dalam "Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia", Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1997
- Pasha, Hafiz A. & Kaiser Bengali, *Impac of Fiscal Incentives on Industrialisation in Backward Areas (A Case Study of Hub Chowki in Baluchistan, Pakistan* Journal of Applied Economics, 1985.
- Prud' Homme, *The Dangers of Decentralization*, The World Bank Research Observer, August, 1995
- Richardson, Harry W., *Elements of Regional Economics*, terjemahan Paul Sitohang "Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional", Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1991.